



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

ZULKIFLI RAUF bin HAMZAH RAUF, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

SIANE MOHAMAD binti MOHAMAD SUNA, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 6 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 7 Maret 2014 dengan Nomor 36/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 1 of 15



mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Permata (dahulu Desa Mutiara), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo), dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama MOHAMAD SUNA yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman atas nama SAID M. DJABI). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah MUHAJIR ADAM dan RINO MUKSIN.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati dengan 1 orang anak.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - a. LUSIANA RAUF, perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1988.
 - b. SILVANI RAUF, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 1994.
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilmuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (ZULKIFPI RAUF bin HAMZAH RAUF) dan Pemohon II (SIANE MOHAMAD binti MOHAMAD SUNA) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1987 di Desa Permata (dahulu Desa Mutiara) adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*



dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RINO A. MUKSIN bin ABU MUKSIN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syar'i, bertempat tinggal di Dusun Mata Putih, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama ZULKIFLI RAUF dan Pemohon II bernama SIANE MOHAMAD sebagai tetangga dan keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 April 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MOHAMAD SUNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah Pemohon II mewakilkan kepada Pegawai PPN yang bernama SAID M. DJABI untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa ayah Pemohon II mewakilkan kepada SAID M. DJABI karena ayah Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah MUHAJIR ADAM sebagai Kepala Desa Mutiara dan saya sendiri RINO A. MUKSIN sebagai Kepala Dusun.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dengan seperangkat alat sholat secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1985.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun Buku Nikah tidak ada.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi meskipun dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.
- 2. MUHAJIR ADAM bin MUHSIN ADAM, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mata Putih, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama ZULKIFLI RAUF dan Pemohon II bernama SIANE MOHAMAD sebagai tetangga dan keduanya sebagai suami isteri.
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 April 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MOHAMAD SUNA.
 - Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah Pemohon II mewakilkan kepada Pegawai PPN yang bernama SAID M. DJABI untuk mengucapkan ijab.
 - Bahwa ayah Pemohon II mewakilkan kepada SAID M. DJABI karena ayah Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah RINO A. MUKSIN sebagai Kepala Dusun dan saya sendiri MUHAJIR ADAM sebagai Kepala Desa.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dengan seperangkat alat sholat secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1985.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun Buku Nikah tidak ada.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi meskipun dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.



Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadiliperkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase



“pernyataan tentang sahnya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1987 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 April 1987, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama MOHAMAD SUNA yang memberikan kuasa kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paguyaman bernama SAID M. DJABI untuk mewakili ayah Pemohon II untuk mengucapkan ijab karena ayah Pemohon II tidak mengetahui kalimat ijab, Para Pemohon menikah dihadiri pula oleh dua orang saksi yakni RINO A. MUKSIN dan



MUHAJIR ADAM dan kedua saksi beragama Islam dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, sebelum menikah, para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun tidak terbit buku nikah. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi meskipun Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan.

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui,



sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat. Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Paguyaman, yang diperkuat pula dengan keterangan kedua saksi yang mengetahui perihal tersebut bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun tidak terbit buku nikah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) dan (2).



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Pemohon sebelum menikah telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun buku nikah tidak dapat diterbitkan karena tidak ada data tentang peristiwa nikah tersebut di kantor tersebut maka patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan Pembantu PPN tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menjalaninya sesuai dengan ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari para Pemohon untuk menaati aturan perkawinan. Sebaliknya tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan oleh Pembantu PPN yang tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN, sehingga kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 26 April 1987 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulaw*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1987 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ZULKIFLI RAUF bin HAMZAH RAUF) dengan Pemohon II (SIANE MOHAMAD binti MOHAMAD SUNA) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1987 di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo.
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Hakim dan didampingi oleh **Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H

INDAH ABBAS, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).